

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENYALURKAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA
SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

Oleh :

AJENG RAHMADINI PRASTICIA
1903090040

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **AJENG RAHMADINI PRASTICIA**

N P M : 1903090040

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Jum'at, 26 Mei 2023

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP**

PENGUJI II : **SAHRAN SAPUTRA, S.Sos.,M.Sos**

PENGUJI III : **Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si**

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **AJENG RAHMADINI PRASTICIA**
N.P.M : 1903090040
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEKIP KECAMATAN
LUBUK PAKAM**

Medan, 26 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MOHD YUSRI, M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Dr.H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP



PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, AJENG RAHMADINI PRASTICIA, NPM 1903090040, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 08 Juni 2023

Yang menyatakan,



AJENG RAHMADINI PRASTICIA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM

AJENG RAHMADINI PRASTICIA
1903090040

Abstrak

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu: Birokrasi, komunikasi, pelaksanaan. Proses pelaksanaan bantuan sosial sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial di Desa Sekip berupa bantuan sosial UMKM, sembako, dan pengobatan gratis yang dikonversikan sesuai aturan pemerintah. Penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan sosial di desa sekip ini kerap dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan sosial dan bagaimana cara mengurus persyaratan agar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dan data yang dapat dilapangan di deskripsikan, hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Di Desa Sekip proses implementasi birokrasinya sudah cukup terealisasikan dengan baik, bisa disebut demikian karena bantuan sosial yang disalurkan telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima. Informan utama merupakan masyarakat yang menerima bantuan sosial. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran diharapkan pemerintah Desa Sekip dapat mempertahankan pelaksanaan birokrasi yang sudah terlaksana dengan baik sehingga dengan adanya bantuan sosial dapat mensejahterakan masyarakat miskin.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyaluran, Bantuan Sosial, Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis panjat persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari Jalan Jahilliyah hingga sekarang pada zaman yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam”. Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada kedua orangtua penulis yaitu, Ayahanda Supratno dan Ibunda Susilawati serta nenek penulis dan adik-adik kandung penulis yaitu Siti Chairani M. Bintang Prasetyo dan Maghfira Khairunnisa

yang tiada henti untuk memberikan semangat dan motivasi serta akomodasi kepada penulis. Terimakasih untuk segala doa, nasehat, kasih sayang yang tiada batas serta kerja keras yang kalian berikan untuk membesarkan dan mendidik penulis, semoga semua hal baik akan menghampiri kalian, aamiin yaa rabbal ‘alamin. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Mohd. Yusri., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu membimbing, mendidik, dan mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar.
6. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama proses belajar.
7. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen yang selalu

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama proses belajar.

8. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.
9. Bapak Rahmat selaku Kepala Desa Sekip, beserta masyarakat di Desa Sekip yang telah memberikan izin penelitian dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
10. Tak lupa fatner penulis Dian Agung Jepry yang membantu dalam memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Tak lupa sahabat penulis yang membantu dalam memberi dukungan dan motivasi untuk penulis yaitu Sagita Lubis, Haura Febbiyona Gusman, Nurul Husna Lubis, Almh. Tri Ama Egi, Rati Pratiwi, dan Ryana Indah ayuni.
12. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (HMJ KESSOS FISIP UMSU) yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam proses kegiatan belajar dan memeberikan pengalaman dan pelajaran yang tidak didapatkan pada mata kuliah.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2023

AJENG RAHMADINI PRASTICIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1. Implementasi	8
2.2. Kebijakan Bantuan Sosial	12
2.3. Penyaluran.....	16
2.4. Kemiskinan	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Kerangka Konsep	25
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	26
3.5. Informan.....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Teknik Analisis Data.....	29
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Hasil Penelitian	32
4.2. PEMBAHASAN	45
BAB V PENUTUP	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle 1980: 7 dalam Akib 2010 bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) dalam Akib 2010 bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang banyak ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan, banyak sumber bantuan sosial yang diberikan bisa pemerintah langsung atau dari organisasi sosial yang berbadan hukum yang langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang syarat dan kriteria penerima bansos yang bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 menyatakan bahwa: “Anggota/keompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah, kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis, Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah”.

Bansos tidak boleh diberikan pada setiap tahun anggaran, walaupun ada yang diberikan secara terus-menerus, itu ada sebab lain, misalnya supaya penerima bantuan bebas dari resiko sosial. Untuk mengatasi masalah ini, maka disusun

Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran dan Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bansos tahun 2011 yang mengatur tentang pengungkapan belanja Bansos pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Daerah diperbolehkan memberikan Bansos sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima Bansos adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bansos dapat juga diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah (*Non Government Organisation*) yang bergerak dibidang pendidikan,

keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kriteria penerima Bansos adalah mereka yang berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari Bansos adalah untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas.

Bansos rawan penyimpangan karena berkaitan erat dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Permasalahan timbul karena tidak adanya batasan yang jelas atas belanja dana tersebut. Pengertian umum dari pemberian Bansos yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sering diartikan sebagai belanja Bansos.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan sosial tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial (UU Nomor 11 Tahun 2009). Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2012, bantuan sosial (bansos) merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya: Bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang adanya bantuan sosial dan bagaimana cara mengurus persyaratan agar mendapatkan bantuan sosial tersebut. Hal ini bersumber dari jurnal efektivitas bantuan sosial bagi keluarga miskin (Sumber Data, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial, Amru Alba, 2019).

Dalam penyaluran bantuan sosial khususnya di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan dan juga bantuan sosial tersebut dirasa tidak tepat sasaran. Masyarakat tersebut mengalami permasalahan mengapa ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sekalipun, padahal kalau dilihat dari kriteria fakir miskin, dia termasuk dalam kriteria tersebut dan berhak mendapatkan bantuan sosial. Malah yang mendapatkan bantuan sosial itu masyarakat yang dilihat dari kondisi rumah dan kehidupannya ia tidak layak mendapatkan bantuan sosial itu. Jadi masyarakat banyak yang mengeluh kalau bantuan sosial dirasa tidak tepat sasaran (Sumber Data, Masyarakat Setempat).

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat miskin perekonomian di Kabupaten Deli Serdang sangat tertekan, diduga karena banyaknya pekerja atau buruh dikenakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Selisih tenaga kerja yang tidak

terserap ini, kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran (Sumber Data, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial, Amru Alba, 2019) .

Perbaikan data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program bantuan sosial tepat sasaran dan juga merata. Banyaknya keluhan terkait distribusi bantuan sosial untuk masyarakat membuat Kementerian Sosial terus berupaya mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Data adalah kunci dari penyelesaian masalah tersebut. Hal ini bersumber dari jurnal efektivitas bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

Pemerintah berupaya memulihkan kondisi ekonomi, dengan penyaluran bantuan sosial yang merupakan agenda sungguh-sungguh yang lagi dihadapi oleh Kabupaten Deli Serdang. Desa Sekip merupakan salah satu desa di Kabupaten Deli Serdang yang sebagian besar masyarakatnya sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani, buruh, dan wiraswasta.

Berdasarkan paparan permasalahan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, dapat diketahui bahwa supaya penyaluran ini bergerak optimal sesuai tujuan maka perlu adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Dalam hal ini, penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam”.

1.2. Rumusan Masalah

Pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam.

1.4. Manfaat Penulisan

Harapan dari penulis untuk tulisan ini adalah agar tulisan ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis: Harapannya tulisan ini mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penulis-penulis lainnya dan menambah wawasan dalam mengetahui bagaimana pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
2. Secara Praktis: Menambah pengalaman secara langsung mengenai pembelajaran pada upaya untuk menyalurkan bantuan sosial yang tepat bagi masyarakat miskin.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai Pedoman penulisan maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima Bab. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Deskripsi data Narasumber hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

2.1.1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Menurut Solichin (2004), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah mereka dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) dalam Akib 2010 bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) dalam Akib 2010 bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane (2010) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan *outcome*. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van

Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) dalam Akib 2010 bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10) dalam Akib 2010, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

T. B. Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Menurut Quade (1984: 310) dalam Akib 2010, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan, dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Pada pengembangan model tersebut dapat diketahui model mental para pakar dan implementor bersama kelompok

sasaran kebijakan minimal berdasarkan relevansi dan keefektifan implementasi kebijakannya.

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di-sampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2.2. Kebijakan Bantuan Sosial

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta dan individu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh

seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan keterlibatan *stakeholder*. Kebijakan jangan sampai mengaburkan tingkat keterlibatan *stakeholder*. Ide kebijakan hendaknya melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan karena kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan, bukan apa yang diusulkan dalam kegiatan.

Sigit I Lesmana (2010) Setiap kebijakan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Kebijakan bisa disebut semacam jawaban terhadap masalah yang ada. Kebijakan juga merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Yusri (2021) Istilah kebijakan kerap kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara dinegara Republik Indonesia. Apalagi jika kita bekerja sebagai karyawan dilingkungan perusahaan atau ikut dalam kepengurusan dalam partai politik, termasuk sebagai aparat sipil negara (ASN) atau bekerja sebagai anggota TNI/POLRI.

Budi Winarno (2014) Konsep kebijakan dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara

kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

2.2.2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Menurut UU nomor 14 Tahun 2019, Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial.

Bansos dikeluarkan melalui anggaran Negara (APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat.

Pemberian Bansos ini dari keuangan daerah (APBD) diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011. Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bansos sudah tercantum dalam APBD yang telah dibahas dan ditetapkan tahun sebelumnya, sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkan penerimaan besaran

bansos pada tahun berjalan sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan kepala daerah.

Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak. Bukan saja masyarakat/kelompok masyarakat, Gubernur/Bupati/Walikota, dan anggota DPRD yang berkepentingan dengan bansos. Bansos menjadi menarik karena banyak pihak yang membutuhkannya. Masyarakat atau kelompok membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Menurut Nasrullah dan Annisa (2021) kesejahteraan sosial dilakukan pemerintah sebagai usaha yang terencana dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Kesejahteraan ini bukan hanya tertuju pada aspek fisik dan ekonomi saja, akan tetapi dipertegas bahwasanya kegiatan itu berfokus pada kesejahteraan masyarakat banyak lebih tepatnya masyarakat yang kurang beruntung.

Seperti halnya di Kabupaten Deli Serdang khususnya masyarakat di Desa Sekip yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Mereka tentu saja sangat membutuhkan Bansos untuk membantu meringankan beban dan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya.

2.2.3. Tujuan Pemberian Bantuan Sosial

Rehabilitasi Sosial, Bansos bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Perlindungan Sosial, Tujuan selanjutnya adalah

untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan Sosial, Bansos juga bertujuan sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial, Bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan Kemiskinan, Tujuan bansos sebagai penanggulangan kemiskinan memiliki arti bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan Bencana, Pemberian bansos bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

2.3. Penyaluran

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya. Bantuan sosial

tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan saat ini sedang memasuki penyaluran tahap kedua. Beberapa permasalahan yang muncul dari penyaluran bantuan sosial tahap satu disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman, diketahui terdapat warga di Jakarta mengembalikan bantuan sosial, karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di Bali juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan dan di Padang terjadi kerumitan data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan (Ratna Sari Dewi, 2020).

Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini.

Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. (CNBC, 2020) Beliau mengatakan bahwa setiap Kementrian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Ketidak sinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga

yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat.

Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang di berikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Kemudian, persoalan pendataan juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Beliau menyatakan Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bansos, jangan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah (CNBC, 2020).

Hirawan (2020) pada artikelnya "Optimizing The Distribution Of The Sosial Assistance Proqram During The COVID-19 Pandemic". Dia menjelaskan bahwa distribusi program bantuan sosial tidak pernah mudah. Ini umumnya disebabkan oleh kurangnya kesiapan partai yang mendistribusikan bantuan, yaitu Pemerintah. Masalah dapat mulai dari pengumpulan data sampai penerima bantuan sosial, yaitu keluarga penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat). Barany & Simanjuntak (2020) berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan dipertimbangkan sehingga distribusi program bantuan sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien: cakupan bantuan sosial, skema bantuan sosial,

durasi pandemi, dan kesiapan Pemerintah, dan mekanisme distribusi bantuan sosial.

2.3.1. Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribuaian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Diantara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Soekartawi, pengertian distribusi ialah aktivitas menyalurkan atau mengirimkan barang dan jasa supaya sampai konsumen akhir. Menurut Assauri, pengertian distribusi ialah kegiatan memindahkan produk dari sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Menurut Basu Swastha, definisi distribusi ialah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi ialah produsen, distributor, konsumen atau industri. Menurut Komaruddin Sastrodipoera distribusi adalah gerakan barang, dan semua hal termasuk pengertian gerakan, dari pabrik ke pengguna, melalui saluran

distribusi. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi pemberian bantuan sosial yang sangat penting dilakukan dalam pendistribusian yaitu untuk mengembangkan dan memperluas dan mempercepat arus bantuan sosial mulai dari pemerintah sampai ketangan masyarakat sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran bantuan sosial mulai dari pemerintah sampai ketangan masyarakat.

2.4. Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia.

Mujahiddin dan Mahardika (2017) Banyak ahli yang mengaitkan masalah kemiskinan dengan kondisi ekonomi seseorang. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, hanya saja pada banyak kasus, kemiskinan juga terkait erat dengan kondisi sosial, budaya, dan structural.

Kemiskinan di Indonesia yang telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang, memberikan pemahaman bahwa gejala kemiskinan ini tidak cukup

diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya bukan hanya masalah keterbatasan lapangan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Namun kemiskinan sudah menjadi realitas sistem/struktur dan tata nilai kemasyarakatan, dalam bentuk realitas budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah terhadap keadaan. Tata nilai dan sistem sosial ekonomi serta perilaku yang telah terbiasa dengan kemiskinan menyebabkan mereka yang miskin untuk tetap miskin. Jika demikian keadaan itu membuat keluarga masyarakat tersebut juga miskin terhadap arti dari kata kemiskinan itu sendiri (Harsono, 2009 : 25).

Yusri (2022) krisis menjadikan analisis masalah kemiskinan yang komprehensif dan mendalam jelas sangat diperlukan. Lebih dari itu, sangat perlu ditelaah bagaimana dampak krisis pada penduduk lapisan bawah dari segi ketahanan pangan, aspek kemampuan rumah tangga mempertahankan anaknya untuk tetap sekolah dan tetap sehat. Informasi mengenai penduduk yang masuk dalam kategori miskin termasuk karakteristik kemiskinan merupakan upaya agar target program pengentasan kemiskinan dapat dibuat lebih akurat.

2.4.2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Siahaan, (2017) jenis-jenis kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kemiskinan manusia, yaitu kekurangan kapabilitas esensial manusia terutama melek huruf dan gizi.
- b. Kemiskinan pendapatan, yaitu kekurangan pendapatan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum.
- c. Kemiskinan absolut yaitu tingkat kemiskinan di bawah kebutuhan minimum untuk bertahan hidup yang tidak dapat dipenuhi.

- d. Kemiskinan relatif, yaitu didefinisikan dalam hubungannya dengan sesuatu rasio garis kemiskinan absolut atau di negara maju sebagai proporsi pendapatan rata-rata perkapita.
- e. Indeks pembangunan manusia (HDI) yaitu menurut program Pembangunan PBB, HDI merupakan komposit dari tiga faktor yaitu harapan hidup pada waktu lahir, melek huruf dewasa, dan pendapatan per kapita.
- f. Indeks kemiskinan manusia (IKM) yaitu ukuran untuk ketiadaan kebutuhan dasar manusia.
- g. Ukuran pemberdayaan gender, yaitu assesmen program Pembangunan PBB tentang tingkat kesenjangan gender di bidang-bidang ekonomi yang penting, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

2.4.3. Kriteria Fakir Miskin

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Teregister Pada Kepmensos 146/HUK/2013 yaitu:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian/mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang.
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

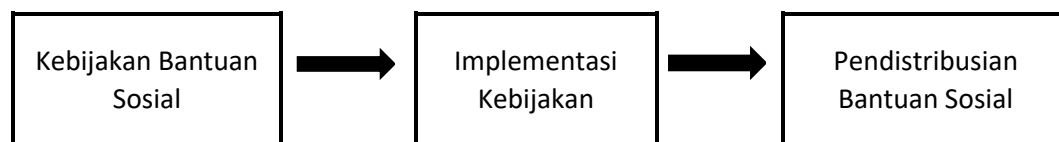
3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai konsekuensi metodologis dari paradigma interpretatif. Suatu paradigma yang lebih idealistik dan humanistik dalam memandang hakikat manusia Sanjaya (2013:130). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*).

3.2. Kerangka Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka konseptual harus dimasukkan dalam literatur otoritatif sebagai otoritas tertinggi, dan bahwa hal itu didasarkan pada kebutuhan pengguna dan prinsip-prinsip etis yang terkait dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, dengan merekomendasikan adopsi kekhawatiran yang mengesampingkan untuk objektivitas dan ketidak berpihakan dalam membantu pengadilan untuk memahami hal-hal yang rumit dalam penelitian Putri (2019:526). Berikut adalah kerangka konsep dalam penelitian ini:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep



3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan Bantuan sosial (Bansos) adalah keputusan yang dibuat lembaga atau pejabat pemerintah untuk memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang kepada masyarakat yang kurang mampu.

- b. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.
- c. Penyaluran bantuan sosial adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang disalurkan dari satu pihak ke pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah proses perbandingan, bukan sekedar menggabungkan informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam kategori lain. Kategorisasi juga diperlukannya data yang terstruktur dalam melakukan penelitian Kurniawan (2018:84). Kategorisasi juga merupakan penyusunan berdasarkan kategori penggolongan dan proses dan hasil pengelompokan unsur bahasa dan bagian pengalaman manusia yang digambarkan ke dalam kategori. Dalam psikologi, kategorisasi merupakan kesimpulan diagnosis dari gejala awal fakta yang didapat.

Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian

No.	Kategorisasi	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi • Komunikasi • Pelaksanaan
2.	Pendistribusian Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • UMKM • Bantuan Sembako • Bantuan Pengobatan Gratis

Sumber: Hasil Olahan, 2023

3.5. Informan

Pada penelitian kualitatif dikenal istilah informan. Informan pada penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/fenomena yang terjadi pada informan itu sendiri. Penentuan jumlah informan sifatnya fleksibel artinya peneliti dapat menambah jumlah informan di tengah proses penelitian jika informasi yang didapatkan dirasa masih kurang.

Informan adalah orang atau lembaga yang di jadikan sasaran dalam mengumpulkan informasi yang mengetahui dengan jelas tentang keadaan ataupun masalah yang sedang diteliti. Dalam Pemilihan sampel akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu Peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Yang dimaksud pertimbangan disini adalah hanya mengambil sampel yang langsung menjawab rumusan masalah dari peneliti Sugiono (2017:67).

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam melibatkan 5 informan yang diantaranya: 1 Kepala Desa Sekip, 1 Bidang Kesejahteraan Masyarakat Desa, dan 3 orang masyarakat yang menerima bantuan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian Soewadji (2012:159). Dalam mendapatkan data terdapat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

- 1) Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (Partisipatif) ataupun Nonpartisipatif. Observasi mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.
- 2) Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Teknik ini dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur ataupun wawancara terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi

tunggal, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis.

- 3) Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dilakukan dengan survei *literature* yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Nugrahani, (2014 : 169-177) Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan untuk melakukan pencarian kembali data baru di lapangan, atau menelusuri kembali semua bukti penelitian yang tersimpan, apabila data yang diperoleh dirasa kurang mantap sebagai dasar penarikan simpulan. Dengan demikian, selama analisis data dilakukan dalam proses siklus, secara tidak langsung telah dilakukan triangulasi data untuk kepentingan penarikan simpulan akhir penelitian. Ketiga langkah dalam komponen analisis data adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

b. Sajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data

dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua Langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Sekip. Waktu penelitian dilaksanakan pada November-Desember 2022.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Desa Sekip merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Desa Sekip memiliki luas wilayah 71 Ha dengan jumlah penduduk 1983 jiwa dan jumlah rumah yang ada sekitar 2920 bangunan. Di Desa Sekip terdapat program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bantuan sosial tersebut berupa: bantuan sosial UMKM, bantuan sembako, dan bantuan pengobatan gratis.

Penyaluran bantuan sosial yang merupakan agenda sungguh-sungguh yang lagi dihadapi oleh Kabupaten Deli Serdang. Desa Sekip merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya sangat mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani, buruh, dan wiraswasta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam

Adapun profil Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 471 Ha
2. Jumlah Kk : 5220 Kk
3. Jumlah Dusun : 16 Dusun
4. Jumlah Penduduk : 1983 Jiwa
5. Jumlah Rumah : 2920 Bangunan
6. Agama Penduduk : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha
7. Fasilitas yang Ada di Desa Sekip:
 - Perpustakaan Desa Sekip
 - Posyandu Desa Sekip
 - SD Negeri
 - Gedung Sekolah Tk
 - Rumah Warga
 - Masjid Desa Sekip
 - Lapangan Kosong
 - Lapangan Badminton
 - Mesjid Baiturrahman

- Perkuburan Desa Sekip
- Mushola Al-Ikhlas

8. Pekerjaan Masyarakat:

Tabel 4.1.1 Pekerjaan Masyarakat Kampung Nelayan Seberang

Nama Pekerjaan	Keterangan
Petani	50 %
Pedagang	30 %
Karyawan Swasta	15 %
Wiraswasta	45 %
Pegawai Negeri Sipil	16 %
Polri	10 %
TNI	10 %
Lainnya	13 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

4.1.2. Peta/ Denah Desa Sekip

Berikut adalah Denah Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sebagai berikut:

Gambar 4.1.2 Peta/ Denah Desa Sekip



Sumber: Dokumen gambar hasil penelitian di Desa Sekip, 2023

4.1.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis. Penulis berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari setiap informan yang telah diwawancarai mengenai “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam”.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang semuanya informan yaitu kepala desa dan bidang kesejahteraan masyarakat desa serta masyarakat yang menerima bantuan sosial di desa sekip, sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan

Untuk mengamati Implementasi kebijakan umumnya tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan kebijakan birokrasi yang ada di desa ini dan siapa saja yang terlibat dalam membantu susunan birokrasi untuk melayani masyarakat.

“Beliau menjawab pelaksanaan birokrasi didesa ini masi berjalan sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk membantu pelayanan masyarakat sehingga dalam menjalankan kehidupannya masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Yang terlibat dalam

membantu susunan birokrasi untuk melayani masyarakat semua perangkat desa terlibat dalam susunan birokrasi ini”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret 2023)

Setelah menanyakan pelaksanaan birokrasi, kemudian peneliti juga bertanya bagaimana proses pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial yang ada di Desa Sekip. Bapak Rahmat menjelaskan bahwa bantuan sosial di desa sekip ini pendistribusiannya melalui bank-bank kecil, atau bisa langsung ke kantor pos.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Rahmat.

“Beliau menjelaskan untuk bantuan sembako didistribusikan secara mekanisme uang elektronik yang bekerja sama dengan bank-bank kecil dan bisa melalui kantor Pos, kemudian saat menerima dana, KPM dicocokkan datanya dan didokumentasikan. Masyarakat penerima bantuan yang telah terverifikasi dan valid nama, alamatnya dan niknya agar bantuan tepat sasaran. Kemudian apabila data sudah sesuai maka transfer dana bisa dilakukan melalui bank-bank milik negara dan PT. Pos. pada saat menerima dana, di Kantor Pos mereka dipanggil dengan surat yang dibubuhi barcode, kemudian difoto dengan menunjukkan KTP. Data hasil dokumentasi dari proses di kantor pos, kemudian dikirimkan ke dalam server data ini yang nanti menjadi bagian administrasi dan petanggung jawaban. Kesesuaian data nama dan alamat diperlukan agar pendistribusian bantuan tepat sasaran”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Kepala Desa pada 20 Maret 2023)

Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program indikatornya yaitu ditujukan untuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi target utama dalam bantuan ini adalah masyarakat yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat serta keluarga yang tidak mendapat bantuan apapun sebelumnya. Di Desa Sekip mengenai ketepatan sasaran program bantuan sosial sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Namun dari data tersebut masih tumpang tindih untuk siapa saja yang menerima dan apakah program

tersebut telah tepat sasaran. Kemudian peneliti menanyakan apakah bantuan sembako ini sudah tepat sasaran.

“Beliau menjawab bantuan sosial ini tidak sesuai harapan masyarakat, karena masyarakat maunya kan semuanya dibagi rata, semua mau dapat, sementara dalam penyaluran bantuan sembako itu ada aturan dan ketentuan jadi kalau harapan masyarakat itu pasti tidak sesuai, karna keinginan masyarakat tersebut belum tentu sesuai dengan peraturan. Tapi kalau ditanya tepat sasaraannya, tentu saja sudah, karena kami kan ada data penerima bantuan, supaya penerima bantuan sembako ini bisa tepat sasaran”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret 2023)

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dan dari mana sumber data yang didapat untuk penerima bantuan sosial ini.

“Beliau menjawab kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan ini masyarakat kurang mampu yang dilihat sesuai kriteria fakir miskin pada kepmensos 146/HUK/2013. Sumber data bantuan sosial ini didapatkan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret 2023)

Sebelum melangkah ke program bantuan tentunya dilakukan edukasi, dalam tahap ini masyarakat diberikan informasi mengenai program bantuan sosial yaitu bantuan UMKM, sembako, dan pengobatan gratis. Proses edukasi merupakan sebuah proses yang penting dalam melakukan suatu program. Karena melalui edukasi masyarakat akan mengetahui secara jelas terhadap program ini bagaimana makna serta tujuannya. Kemudian peneliti menanyakan adakah edukasi yang diberikan pemerintah desa mengenai bantuan sosial ini.

“Beliau menjawab untuk Desa Sekip sudah melakukan edukasi serta transparansi secara publik mengenai adanya bantuan sosial

ini.” (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret 2023)

Di Desa Sekip bantuan sosial sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan efektif karena masyarakat dapat menikmati secara utuh dari bantuan tersebut tanpa adanya potongan apapun. Kemudian peneliti menanyakan apakah pembagian bantuan sembako ini sudah merata.

“Beliau menjawab pembagiannya sudah diberikan secara merata, dikarenakan validasi data yang kami kumpulkan sudah sesuai, dan juga yang kami berikan kepada masyarakat tersebut. Tetapi masyarakat menganggap pasti ada yang tidak merata karena ada yang tidak kebagian. Dikarenakan kendalanya, yang pertama uang, uang kita gak mencukupi untuk belanja-belanja lain di desa, sehingga itulah penyebabnya kenapa masyarakat itu merasa itu tidak merata, kami itu kewalahan tidak memberikan, karna uang yang diluncurkan pemerintah untuk bantuan sosial ini terbatas”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret 2023)

Kemudian peneliti menanyakan apa saja yang menjadi standar atau sasaran dari kebijakan bantuan UMKM ini dan siapa saja pelaksana dari kebijakan pemberdayaan UMKM ini.

“Beliau menjawab sasaran dari kebijakan pemberdayaan UMKM ini agar semakin meningkatnya tata kelola kelembagaan koperasi dan UMKM, juga meningkatkan standarisasi dan perlindungan UMKM. Pelaksana dari kebijakan pemberdayaan UMKM yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat”. (Hasil wawancara dengan bapak Rahmat selaku kepala desa pada 20 Maret 2023)

B. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, penyaluran ini disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya

maupun ke berbagai pihak. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, selalu terjadi permasalahan dalam penyalurannya. Bantuan sosial tahap satu dari pemerintah sudah berjalan dan saat ini sedang memasuki penyaluran tahap kedua. Ada berbagai macam jenis bantuan sosial yang disalurkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Seperti bantuan paket sembako (beras, gula, minyak goreng, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan), Bantuan pengobatan gratis, dan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Jenis bantuan yang ada di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam ada 3 yaitu:

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Tabel 4.1.2 Identitas Informan UMKM

No.	Kategori	Keterangan
1.	Nama	Sri
2.	Usia	54 tahun
3.	Jenis Kelamin	Perempuan
4.	Pendidikan Terakhir	SD (Sekolah Dasar)
5.	Pekerjaan	Asisten rumah tangga
6.	Alamat	Jalan Pembangunan 1 Desa Sekip
7.	Jumlah Anak:	
	a. anak yang bersekolah	2
	b. anak yang tidak bersekolah	1
	c. anak yang bekerja	-
8.	Bantuan Sosial	UMKM

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Salah satu jenis bantuan yang masuk di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu namun masih 47% memiliki niat untuk membuka usaha. Jumlah uang yang diberikan senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

rupiah). Tiap satu orang hanya dapat sekali mengajukan program tersebut dengan melampirkan foto usaha yang akan dijalankan.

Kemudian peneliti menanyakan tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan bantuan UMKM dan dimana ibu mengambil bantuan UMKM. Beliau menjawab syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM ini harus WNI, dan mempunyai usaha yang lagi dijalankan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri:

“ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti foto KTP (Kartu Tanda Penduduk), foto KK (Kartu Keluarga) dan foto jenis usaha yang akan dijalankan. Jika sudah terdaftar penerima bantuan UMKM pelaku usaha mikro bisa langsung mencairkan dana bantuan umkm sebesar Rp. 1.200.000 atau langsung di transfer ke rekening.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret 2023)

Bantuan UMKM adalah bantuan langsung tunai untuk UMKM yang disalurkan oleh pemerintah melalui 2 kementerian, yaitu kementerian koperasi dan UKM serta kementerian sosial. Kementerian koperasi dan UKM akan menyalurkan BLT UMKM sebesar Rp. 1.200.000 kepada pelaku usaha mikro. Penuturan Ibu Rita dari hasil wawancara adanya syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM dengan melampirkan jenis foto usaha yang akan dijalankan.

Kemudian peneliti menanyakan sudah berapa lama ibu mendirikan usaha ini dan berapa harga kisaran tahu walik yang ibu jual. Beliau menjawab kurang lebih 2 tahun lamanya beliau mendirikan usaha ini dan menjual perporsi tahu walik Rp. 10.000 dengan potongan 8 pcs saja. Berikut Hasil wawancara dengan Ibu Sri.

“2 tahun sudah ibu berjualan tahu walik ini, harga jual untuk 1 tahu walik adalah Rp. 1.000 dimana outlet lain menjual perporsi 10.000 dengan potongan 8 pcs saja, sehingga membuat pelanggan lebih merasa hemat untuk membeli tahu walik ini.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret 2023)

Kemudian peneliti menanyakan apakah dalam menjalankan usaha ini ibu dibantu oleh karyawan dan dalam mempromosikan usaha ini ibu menggunakan media apa saja. Beliau menjawab iya menggunakan karyawan di beberapa outlet, dan dalam mempromosikan jualannya beliau memakai media whatsapp dll. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sri:

“iya ibu memakai karyawan untuk membantu menjalankan usaha ini, mempromosikan usaha ini melalui media whatsapp, facebook, dan Instagram. setiap pembelian 10 box ibu memberikan bonus 1 box untuk pelanggan.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret 2023)

Ibu Sri menjalankan usaha tahu waliknya dengan menggunakan media sosial. Dengan mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, wa, facebook membuat jualan Ibu Sri jadi banyak diketahui masyarakat lain. Kemudian peneliti menanyakan apakah dengan bantuan program UMKM tersebut dapat menstabilkan ekonomi keseharian didalam keluarga.

“iya, keseharian Ibu cukup terbantu dengan adanya modal usaha dari bantuan pemerintah ini. Bantuan UMKM ini membuat kehidupan ekonomi saya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang tadinya salah satu anak saya tidak bisa bersekolah sekarang saya bisa membuat ia bersekolah. Saya juga berterimakasih karena pemerintah sudah mengadakan bantuan UMKM untuk masyarakat kurang mampu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri pada 21 Maret 2023)

2. Bantuan sembako

Tabel 4.1.3 Identitas Informan Bantuan Sembako

No.	Kategori	Keterangan
1.	Nama	Rita Salmidah
2.	Usia	52 tahun
3.	Jenis kelamin	Perempuan
4.	Pendidikan terakhir	SMP

5.	Pekerjaan	Art
6.	Alamat	Jalan sempurna desa sekip lubuk pakam
7.	Jumlah anak:	
	a. Anak yang bersekolah	2
	b. Anak yang tidak bersekolah	-
	c. Anak yang sudah bekerja	-
8.	Bantuan sosial	Bantuan sembako

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam yaitu pembagian bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahan pokok yang diberikan seperti beras 10 (sepuluh) kg, gula 1 (satu) kg, minyak goreng 1 (satu) kg, telur satu papan, sayur-sayuran, dan buahbuahan . Sembako diberikan tiap satu bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah jumlah sembako yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan dan apakah pembagiannya sudah tepat waktu. Beliau menjawab sudah sesuai ketentuan bantuan ini diberikan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rita:

“Ibu mendapatkan bantuan sebesar 200.000 /sebulan dan bantuan ini dibelanjakan di E-Warong bantuan tersebut dibelanjakan untuk membeli beras, telur, tempe, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pembagian ini dilakukan sudah tepat waktu dalam sebulan sekali melalui mekanisme uang elektronik. Dananya pun hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang udah ditentukan. (Hasil wawancara dengan Ibu Rita pada 21 Maret 2023)

Bantuan sembako merupakan bantuan sosial pangan senilai 200.000 /bulan yang disalurkan dalam bentuk nontunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Kemudian peneliti

menanyakan tentang apakah syarat yang harus dipenuhi dalam program bantuan sembako ini.

“Beliau menjawab sasaran program sembako ini keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai yang di informasikan pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan sembako ini harus terdaftar di DTKS dan Namanya harus masuk kedalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) serta mempunyai kartu keluarga sejahtera (KKS). Setelah itu pada saat mengambil bantuan sembako ini harus menyertakan KTP dan KK untuk menghindari terjadinya kecurangan ” (Hasil wawancara dengan Ibu Rita pada 21 Maret 2023)

Ibu Rita menerima informasi adanya bantuan sembako ini dari pihak Desa. Mereka juga mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerima bantuan sembako tersebut. Syaratnya seperti masyarakat harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial dengan begitu pada saat pengambilan bantuan sosial tidak terjadi lagi kecurangan. Kemudian peneliti bertanya dengan mendapatkan bantuan sembako ini sudah tercapainya tujuan.

“Beliau menjawab sangat berterimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan sembako kepada keluarga penerima manfaat karena sebelumnya beliau belum pernah mendapatkan bantuan, bantuan ini sangat membantu untuk keperluan di keluarga ibu, dan bantuan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin. ” (Hasil wawancara dengan Ibu Rita pada 21 Maret 2023)

3. Bantuan Pengobatan Gratis

Tabel 4.1.4 Identitas Informan Bantuan Pengobatan Gratis

No.	Kategori	Keterangan
1.	Nama	Hermanto
2.	Usia	63
3.	Jenis kelamin	Laki-laki
4.	Pendidikan terakhir	SD
5.	Pekerjaan	Tukang becak
6.	Alamat	Jalan spoor desa sekup lubuk pakam

7.	Jumlah anak:	
	a. anak yang bersekolah	-
	b. anak yang tidak bersekolah	-
	c. anak yang sudah bekerja	2
8.	Bantuan sosial	Pengobatan gratis

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Program Kartu Indonesia Sehat diperuntukkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, tidak semua orang bisa terdaftar dalam program ini. Hanya mereka yang digolongkan masyarakat tidak mampu saja yang berhak mendapatkan program jaminan kesehatan ini dari pemerintah. Masyarakat yang kurang mampu di Desa Sekip yang belum tergabung dalam Kartu Indonesia Sehat mendapatkan dispensasi saat mengakses layanan Kesehatan.

Kartu Indonesia Sehat membuat masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Dengan begitu, pemerintah bisa meminimalkan masyarakat kurang mampu yang tidak bisa berobat ketika sakit. Nantinya, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah selaku penyelenggara jaminan kesehatan.

Bapak Hermanto yang berusia 58 tahun yang bekerja sebagai tukang becak beliau mendapatkan salah satu bantuan sosial dari pemerintah yaitu bantuan pengobatan gratis. Kemudian peneliti menanyakan darimana Bapak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bantuan pengobatan gratis ini dan apa saja syarat untuk mendaftar program bantuan pengobatan gratis ini.

“Beliau menjawab Bapak mendapatkan informasi tentang kegiatan pengobatan gratis ini dari kepala dusun, Bapak kepala dusun menyampaikan bahwa akan ada bantuan pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Syaratnya Surat keterangan keluarga miskin, foto copy KK, foto copy KTP, pas photo 2x3 2

lembar. SKKM harus bermaterai 6000.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada 21 Maret 2023)

Bapak Hermanto menerima informasi adanya bantuan pengobatan gratis dari kepala Dusun dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerima bantuan pengobatan gratis tersebut. Kemudian peneliti menanyakan apakah program pengobatan gratis ini sudah tepat sasaran.

“Beliau menjawab masih ada juga yang belum mendapatkan bantuan sosial ini padahal dilihat dari kondisi rumah dan ekonominya mereka layak mendapatkan bantuan sembako ini tetapi mereka tidak dapat, malah masyarakat yang berkecukupan mendapatkan bantuan sembako ini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada 21 Maret 2023)

Dari penjelasan Bapak Hermanto ternyata masih ada juga sebagian masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan ini, dan malah masyarakat yang status ekonominya berkecukupan mendapatkan bantuan ini. Hal ini terjadi karena data yang masuk untuk mendapatkan bantuan sosial ini banyak yang tidak tepat sehingga terjadinya kecurangan. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pelayanan yang diberikan petugas Kesehatan dalam pengobatan gratis ini dan apakah bapak merasa puas dengan fasilitas dan pelayanan yang tersedia.

“Beliau menjawab petugasnya baik dan juga ramah-ramah, selain itu untuk kedisiplinan pada saat proses pelayanan juga bagus, dan Bapak merasa cukup puas karena pemeriksaannya tidak pakai uang melainkan gratis.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada 21 Maret 2023)

Dari penjelasan Bapak Hermanto pelayanan pengobatan gratis ini sangat baik dan proses pelayanan kepada masyarakat juga cepat. Hal ini membuat beliau berterimakasih karena adanya bantuan pengobatan gratis ini bisa membantu beliau

dalam pengobatan keluhan sakitnya. Kemudian peneliti menanyakan adakah manfaat yang diperoleh dari program bantuan pengobatan gratis ini.

“Beliau menjawab sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat kurang mampu seperti saya, dengan adanya pengobatan gratis ini dapat memberitau segala keluhan kesehatannya. saya juga sangat senang sudah mendapatkan bantuan pengobatan gratis ini karena bisa membantunya untuk menjalani pengobatan tanpa dipungut biaya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Hermanto pada 21 Maret 2023)

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun secara berkelompok. Sistem administrasi dibangun untuk melayani kepentingan masyarakat hal ini disebut dengan birokrasi. Birokrasi dikalangan masyarakat dapat dipahami sebagai organisasi dengan pandangan negatif antara lain seperti, pembuatan ktp, akte kelahiran, sertifikat tanah, yang menghambat proses pengurusan dokumen masyarakatnya.

Sesuai hasil wawancara dalam proses birokrasi di desa sekip untuk melayani masyarakat dalam hal administrasi dan yang terlibat kedalam susunan birokrasi yaitu semua perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kabid pemberdayaan masyarakat serta anggota Desa dapat terlayani dengan baik.

Adanya komunikasi yang baik antara Pihak pelaksana dengan masyarakat mengenai bantuan sosial, dimana informasi yang diberikan pihak pelaksana kepada

masyarakat desa yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas proses edukasi serta transparansi terhadap program penyaluran bantuan sosial.

Dalam proses pendistribusian dana bantuan sosial di desa sekip, pemerintah desa terlebih dahulu harus memastikan bahwa pelaksanaan distribusi dana bantuan sosial sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Proses pelaksanaan distribusi dana bantuan sosial sudah ditetapkan melalui mekanisme uang elektronik yang sudah bekerja sama dengan bank milik negara selain dari pada itu pendistribusian dana bantuan sosial juga bisa melalui kantor pos. Kemudian pada saat penerimaan dana tersebut masyarakat harus sesuai dengan data yang sudah terverifikasi oleh pemerintah desa supaya alur dari pendistribusian dana bantuan sosial tersebut dapat tepat sasaran. Setelah semua proses verifikasi data sudah selesai di lakukan maka dana bantuan sosial sudah dapat di distribusikan sesuai dengan cara dan metode yang sudah di pilih oleh penerima dana bantuan sosial tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah merencanakan kegiatan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana siap disalurkan untuk mencapai sasaran dan mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya permasalahan sosial.

Menurut Nasrullah dan Annisa (2021) kesejahteraan sosial dilakukan pemerintah sebagai usaha yang terencana dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencegah serta mengatasi masalah sosial. Kesejahteraan ini bukan hanya pada aspek fisik dan ekonomi saja, akan tetapi untuk

mensejahterakan masyarakat banyak lebih tepatnya masyarakat yang kurang beruntung.

Pemerintah memberikan bantuan sosialnya kepada masyarakat Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Beberapa bantuan sosial oleh masyarakat yaitu:

1. Bantuan UMKM

Bantuan UMKM ditujukan kepada masyarakat kurang mampu namun masih memiliki niat untuk membuka usaha agar dapat membantu perekonomian tiap keluarga. Pemerintah memberikan dana sebesar 1.200.000, Tiap individu yang mengajukan program bantuan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penerima bantuan hanya diberikan sekali dalam program tersebut, dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan dengan menyertakan KTP, KK dan bukti foto usaha untuk menghindari adanya kecurangan setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan.

2. Bantuan Sembako

Bantuan sembako diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan Sembako diberikan tiap satu bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan kepada masyarakat yang kurang mampu. Data masyarakat yang kurang mampu diberikan kepada kepala desa. Dari data tersebut pihak desa dapat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan baik dari Desa maupun Pemerintah Kabupaten tidak bisa mendapatkan bantuan double (dua) kali. Karena setiap masyarakat yang telah

mendapatkan bantuan, harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Bantuan Pengobatan Gratis

Bantuan pengobatan gratis diberikan untuk masyarakat kurang mampu. Namun, tidak semua masyarakat bisa terdaftar di program ini. Hanya masyarakat yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan pengobatan gratis dari pemerintah. Kartu Indonesia Sehat membuat masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar. Pemerintah menerapkan kebijakan dengan melampirkan Surat keterangan keluarga miskin, foto copy KK, foto copy KTP, pas photo 2x3 2 lembar. SKKM harus bermaterai 6000. Dengan begitu, pemerintah bisa membantu masyarakat kurang mampu yang tidak bisa berobat ketika sakit. Nantinya, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah selaku penyelenggara jaminan kesehatan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Di Desa Sekip proses implementasi birokrasinya sudah cukup terealisasikan dengan baik, bisa disebut demikian karena bantuan sosial yang disalurkan telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima.
2. Dari segi kemampuan komunikasi yang kurang baik antara masyarakat dengan pihak pelaksana, informasi mengenai penyaluran bantuan sosial yang didapat dari masyarakat hanya sebagian yang mengetahui adanya bantuan sosial tersebut. Sehingga implementasi kebijakan pemerintah mengenai informasi banyak menimbulkan prokontra.
3. Pada aspek pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial baik dari masyarakat maupun pihak pelaksana telah mengupayakan kebijakan pemerintah agar bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar.
4. Kurangnya sosialisasi penyaluran bantuan sosial yaitu bantuan UMKM, sembako, dan pengobatan gratis dari pemerintah Desa Sekip sehingga banyak masyarakat yang masih belum memahami secara pasti mengenai adanya program bantuan sosial ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang ingin diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Desa Sekip dapat mempertahankan pelaksanaan birokrasi yang sudah terlaksana dengan baik sehingga dengan adanya bantuan sosial dapat mensejahterakan masyarakat miskin yang berada di Desa Sekip.
2. Terkait informasi yang didapat dari pemerintah mengenai penyaluran bantuan sosial tidak menyebarluas ke masyarakat. Diharapkan pemerintah desa sekip melakukan sosialisasi secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat desa sekip.
3. Diharapkan pihak pelaksana mengupayakan semaksimal mungkin terkait aspek pelaksanaan penyaluran bantuan sosial agar lebih bijak dalam menyalurkan bantuannya kepada masyarakat miskin.
4. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti terkait peluang yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat dengan tema penelitian ini, sehingga diperoleh masukan yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib. dkk . “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008 Universitas Pepabari Makassar.
- Agustiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses September 2010.
- Barany, L. J., & Simanjuntak, I. (2020). *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19 : Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran ?* (April), 1– 11.
- CNBC. (2020). *Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data*. Retrieved June 26, 2020, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan_bansos_corona_masalah_klasik_big_data.
- Dewi, R. S. (2020). Berita - Ombudsman RI. Retrieved June 24, 2020, from Ombudsman RI website: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel/evaluasi_penyaluran_bantuan_sosial_bansos_tahap_satu_covid_19.
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategi Konsep-Konsep*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Prinnton Univerisity Press, New Jersey.
- Hirawan, F. B. (2020). *Optimizing the Distribution of the Sosial Assistance Program during the COVID- 19 Pandemic*. (June), 1–7.
- Harsono, 2009. *kemiskinan, bentuk kemiskinan*. Cetakan ketujuh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuriawan, M. A. (2018). *Kategorisasi Berta Menggunakan Metode Pembobotan TF.ABS dan IF.CHI*. *Journal On Computing*, 84.
- Lane. dkk. *Policy Implementation in Poor Countries*, Umea Universit, Sweden, <http://www.gogle.co.id/search>, diakses 5 September 2010.

- Mujahiddin dan Mahardika. 2017. *Perempuan Dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*. Umsu Press.
- Nugrahani, Farida. *Teknik Analisis Data*. Surakarta: PPM Univet Bantara, 2014.
- Nurwati, Nunung. (2008). "*Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*". *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, (Vol 10 No 1) Hlm 1-11.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, and introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions, Elsevier Science Publishers*, New York.
- Sigit I Lesmana. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soeharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, Harlem. "*Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi*", *Prisma*. 2017, 1, pp. 17-31.
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.
- Soewadji. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Winarno, Budi. 2014. "*Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*".
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Yusri M. 2022. *Integrasi Kebijakan Regional Berbasis Kemiskinan*. Umsu Press.
- Yusri M, Dan Syafri S. 2021. *Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Di Indonesia*. Umsu Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ajeng Rahmadini Prasticia
NPM : 1903090040
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 27 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pembangunan I Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara
Email : ajengprasticia@gmail.com

Status Keluarga

Nama ayah : Supratno
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama ibu : Susilawati
Pekerjaan ibu : Guru Senam
Alamat : Jl. Pembangunan I Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam

Pendidikan Formal

2008-2013 : SD Negeri 108384 Lubuk Pakam
2013-2016 : SMP Negeri 3 Lubuk Pakam
2016-2019 : SMA Negeri 1 Lubuk Pakam
2019-2023 : Strata-1 Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU

Medan, Mei 2023

AJENG RAHMADINI PRASTICIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/201
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631603
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita Mengabdikan Masyarakat agar Berbudaya
 nomor dan langganannya
<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedar

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 25 November 2022.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ajeng Rahmadini Prasticia
 N P M : 1903090040
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3,73

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Mirkin Di Dinas Sosial Lubuk Pakam	<u>ACE</u>
2	Penguatan Program UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Bata Bata Di Desa Sidaurip Kecamatan Bebingin	X
3	Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Dan Perlindungan Anak Jalanan	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

007.19.309

Pemohon

(Ajeng Rahmadini Prasticia)

Medan, tgl. 25 November 2022

Ketua, [Signature]

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

H. MUDAH DIBIN, S.Pd, M.Pd
 NIDN: 0178069902

Dr. Mhd. Yusri Iqbal
 NIDN:



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BAN-PT/IAK KP/PT/XV/2022
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://web.umsu.ac.id> Email: fisip@umsu.ac.id umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1745/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : 25 November 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **AJENG RAHMADINI PRASTICIA**
N P M : 1903090040
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM**
Pembimbing : **Dr. H. MOHD. YUSRI, M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 007.19.309 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Masa Kadaluarsa tanggal: 25 November 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 23 Sya'ban 1444 H
16 Maret 2023 M


Dekan
Dr. ARIETN SALLEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal





Dia menyangkut Surat yang agam di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6624474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Deltan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Februari 2023

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ajeng Rahmadini Prastica
N P M : 1902090040
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor.1745/SK/II.3/UMSU-03/F/2023.. tanggal 25.. Nov. 2023.. dengan judul sebagai berikut :

Strategi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Di Dinas sosial Lubuk Pakam

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Dr. Mohd. Yusri - M. Si)

Pemohon,

(Ajeng Rahmadini Prastica)



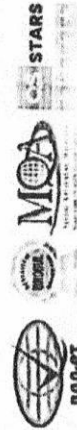
UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 268/JUND/III.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Kecejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023
Waktu : 08.15 WIB s.d. selesai
Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.

No	NAMA MAHASISWA	NOMOR FOKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBERIBING	JUDUL SKRIPSI
6	MUHAMMAD RIZKY WAHYUDI	1903090053	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	PELAYANAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU ANAKSUSU DI PANTI ASUHAN PUTERA MUHAMMADIYAH MEDAN KOTA
7	ABDUL MAJID	1303090016	Dr. H. MOHD. YUSRI, M.Si	Dr. EFENDI AGUS, M.Si	PERAN LAZIMU DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN
8	AJENG RARMA DINI PRASTICIA	1903090040	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	Dr. H. MOHD. YUSRI, M.Si	STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DINAS SOSIAL LUBUK PAKAM
9	DJIAN AGUNG JEPRI	1903090041	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos	Dr. H. MOHD. YUSRI, M.Si	ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCIPTAKAN KAMPUNG BEBAS NARKOBA DI DESA PAGAR MERBAU III
10	TEUKU MUHAMMAD AKBAR	1903090033	Dr. EFENDI AGUS, M.Si	Dr. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP	PERAN PUSKESMAS DALAM MENCEGAH STUTING DI KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN

Medan, 01 Sya'ban 1444 H
22 Februari 2023 M





UMSU
 Unggul Cerdas Terpercaya
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BAN-PT/UK-KEPT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 7 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
 @umsumedan #umsumedan #umsumedan #umsumedan #umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Ajeng Rahmadini Prasticia
 N P M : 1903090040
 Program Studi : Ketuhananan Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemenuhan Daerah Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Selep Kecamatan Lubuk Pakam

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25 Nov 2022	Bimbingan judul skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	19 Januari 2023	Bimbingan Bab 1-3	<i>[Signature]</i>
3.	7 Februari 2023	Bimbingan revisi Bab 1-3	<i>[Signature]</i>
4.	14 Februari 2023	Bimbingan revisi Bab 1-3 dan ACC seminar proposal	<i>[Signature]</i>
5.	2 Maret 2023	Bimbingan draf wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	6 Maret 2023	Bimbingan revisi draf wawancara dan ACC pendataan lapangan	<i>[Signature]</i>
7.	9 Mei 2023	Bimbingan Bab 4-5	<i>[Signature]</i>
8.	16 Mei 2023	Bimbingan revisi Bab 4-5	<i>[Signature]</i>
9.	22 Mei 2023	Bimbingan revisi Bab 4-5	<i>[Signature]</i>
10.	25 Mei 2023	ACC sedang hijau	<i>[Signature]</i>

Medan, 25 Mei 2023.

Dekan,
[Signature]
 Dr. Anjin Sabda S.Sos.M.Si
 NIDN : 003007402

Ketua Program Studi,
[Signature]
 Dr. H. Nurhidayah, S.Sos.M.Pd
 NIDN : 01200889002

Pembimbing,
[Signature]
 Dr. Mohd. Yusri M.Si.
 NIDN : 0104126002





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rita Mariani, Nur Hidayat, Nur Hidayat
www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK-KP/PT/UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://map.umso.ac.id> Email: map@umsu.ac.id Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan) YouTube: [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Nomor : 501/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan Ijin Penelitian Mahasiswa*
Medan, 23 Sya'ban 1444 H
16 Maret 2023 M

Kepada Yth : Kepala Desa Sekip
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : AJENG RAHMADINI PRASTICIA
N P M : 1903090040
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan-I

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN. 0111117804



Cc: File.





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN LUBUK PAKAM
DESA SEKIP

JL. K.H. HASYIM ASY'ARI DESA SEKIP
KODE POS 20517

Nomor : 005/ 1124
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sekip, 14 Juni 2023

Kepada Yth.

**Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik**

di.
Tempat:-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Wakil dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Tanggal 14 Juni 2023 perihal Izin Penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswi sebagai berikut:

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1	AJENG RAHMADINI PRASITIA	1903090040	Kesejahteraan Sosial

Berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam menerima dan memberi izin kepada mahasiswi tersebut melaksanakan Izin Penelitian di Desa Sekip ; sepanjang kegiatan yang dilaksanakan tidak melanggar ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian izin ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ace

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN
DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM**

**AJENG RAHMADINI PRASTICIA
1903090040**

PROGAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Daftar pertanyaan untuk informan Kepala Desa Sekip :

1. Bagaimana pelaksanaan birokrasi yang ada di desa ini ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam membantu susunan birokrasi untuk melayani masyarakat ?
3. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan UMKM, pengobatan gratis, dan bantuan sembako ?
4. Darimana sumber data yang didapat untuk penerima bantuan pemberdayaan UMKM, pengobatan gratis, dan bantuan sembako ?
5. Siapa saja pelaksana dari kebijakan pemberdayaan UMKM ?
6. Apa yang menjadi standar atau sasaran dari kebijakan bantuan sembako ?

Daftar pertanyaan untuk informan bidang kesejahteraan masyarakat Desa :

7. Adakah edukasi yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai bantuan pengobatan gratis ?

8. Bagaimana pola penyampaian informasi dan koordinasi terkait pemberdayaan UMKM ? apakah melalui birokrasi dan dalam bentuk apa ?

9. Apakah informasi terkait pelaksanaan bantuan sembako, pengobatan gratis, dan UMKM selalu konsisten atau tidak berubah-ubah sesuai kebijakan yang berlaku ?

10. Berapa jumlah kuota penerima bantuan sembako di Desa Sekip ?

11. Kapan dan bagaimana bantuan sembako dan bantuan pengobatan gratis diberikan ?

12. Apakah bantuan sembako dan pengobatan gratis sudah tepat sasaran ?

Daftar pertanyaan untuk informan masyarakat yang menerima bantuan :

13. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan bantuan UMKM ini?

14. Dimana Ibu mengambil dana bantuan pemberdayaan UMKM ?

15. Sudah berapa lama ibu mendirikan usaha ini ?

16. Berapa kisaran harga tahu walik yang ibu jual ?

17. Dalam menjalankan usaha ini apakah ibu dibantu oleh karyawan ?

18. Apakah usaha ini melakukan kegiatan promosi penjualan secara langsung dalam memasarkan produk yang ditawarkan ?

19. Dalam mempromosikan usaha ini Ibu menggunakan media apa saja ?

Daftar pertanyaan untuk informan masyarakat yang menerima bantuan :

20. Apakah jumlah sembako yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan kepada KPM ?

21. Apakah pembagian sembako sudah tepat waktu kepada KPM?

22. Bagaimana sikap pelaksana penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai atau penanggung jawab Program BPNT dalam melayani KPM?

23. Apakah KPM sudah mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan tepat administrasi ?

24. Menurut Ibu apakah dengan mendapatkan BPNT sudah tercapainya tujuan ?

Daftar pertanyaan untuk informan masyarakat yang menerima bantuan :

25. Bagaimana menurut Bapak sudah sesuaikah program pelayanan pengobatan gratis ini dengan peraturan yang dibuat pemerintah ?

26. Apakah program pelayanan pengobatan gratis ini pelaksanaannya sudah tepat sasaran ?

27. Apakah ada keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan program pelayanan pengobatan gratis

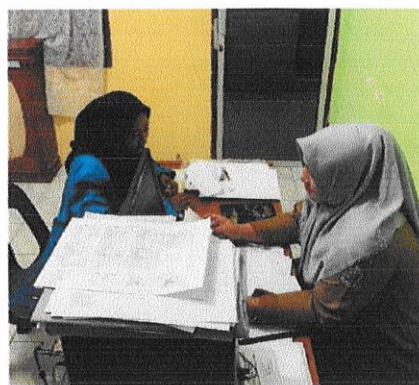
ini ?

28. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai dalam program pelayanan pengobatan gratis ini ?

29. Apakah dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan pengobatan gratis ini ?

30. Adakah manfaat yang diperoleh dalam proses evaluasi program pelayanan pengobatan gratis ini ?

Lampiran:

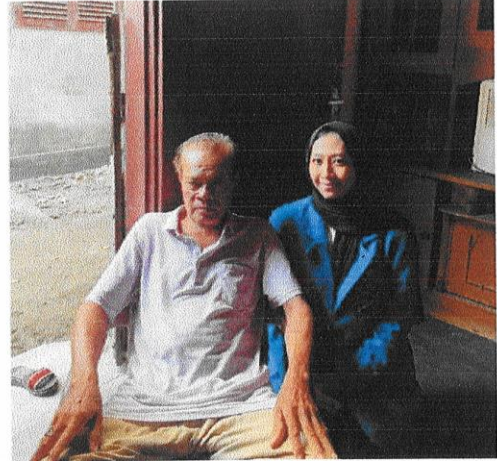


Dokumentasi Penulis Bersama Sekretaris Desa Sekip dan Bidang Kesejahteraan Masyarakat



Dokumentasi Penulis Bersama Ibu Sri Penjual Tahu Walik Yang Mendapatkan Bantuan

UMKM



Dokumentasi Penulis Bersama Ibu Rita Yang Mendapatkan Bantuan Sembako dan Bapak Hermanto Yang Mendapatkan Bantuan Pengobatan Gratis

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Tangguh

UNDANGPANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 761/UND/13.AU/UMSU-03/F.2023

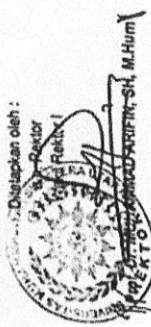
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Jumat, 26 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
10	ALENG RAHMANI PRASTICA	19030900407	Dr. H. MUHAJIDIN, S.Sos., M.Sp.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM
11	M. IQBAL D/RI GULTOM	1903090018	Dr. YURISNA TANJUNG, M.Af.	Dr. H. MUHAJIDIN, S.Sos., M.Sp.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	DAMPAK SOSIAL PENYALAHGUNAAN RARFOBA PADA REMAJA DI FOKUS REHABILITASI NARKOTIKA INDONESIA MARINDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK
12						
13						
14						

Medan, Di Depan Dah 1444 H
24 Mei 2023 M

Disiapkan oleh :
Dosen Pembimbing
M. Hum



Dr. ARIFNY SALEH, S.Sos., M.Sp.
Panitia Ujian



Sekretaris
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

